

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Indo-Pasifik kini menjadi pusat gravitasi baru dalam tatanan global, baik dari segi ekonomi maupun geopolitik. Dalam dekade terakhir, konsep Indo-Pasifik berkembang sebagai kerangka strategis yang merefleksikan pergeseran arus utama kekuatan dunia dari Atlantik ke Asia, khususnya menyangkut perdagangan internasional, keamanan maritim, dan kerja sama lintas kawasan. Istilah ini bukan hanya sekadar label geografis, tetapi mencerminkan perubahan dalam cara pandang negara-negara besar terhadap dinamika kawasan yang mencakup Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai satu kesatuan strategis (Medcalf, 2020). Di tengah perubahan tersebut, Indo-Pasifik menampilkan sejumlah karakteristik penting: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, posisi sebagai pusat jalur pelayaran internasional, kekayaan sumber daya alam, serta munculnya aktor-aktor besar dalam sistem ekonomi dunia (He, 2019).

Indonesia, dengan posisi geografis yang berada di titik temu antara dua samudra besar dan di persimpangan jalur perdagangan global, memiliki kepentingan strategis yang sangat besar terhadap perkembangan di kawasan Indo-Pasifik. Selain menjadi salah satu negara demokrasi terbesar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India yang

semuanya memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di kawasan ini (Fitriani, 2020). Oleh karena itu, strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik tidak hanya bertumpu pada pendekatan keamanan, tetapi juga melalui jalur diplomasi ekonomi, yang berupaya memperluas akses pasar, menarik investasi asing, dan memperkuat kerja sama teknologi serta sumber daya manusia.

Dalam upaya meningkatkan posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia secara aktif menjalankan kebijakan luar negeri berbasis ekonomi melalui pendekatan diplomasi ekonomi. Salah satu instrumen utama dalam strategi ini adalah penggunaan perjanjian *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) sebagai bentuk kerja sama perdagangan dan investasi yang komprehensif. CEPA dirancang untuk melampaui lingkup perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*/FTA) yang tradisional, karena tidak hanya mencakup penghapusan tarif dan liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga memperluas cakupan pada sektor perdagangan jasa, fasilitasi investasi, kerja sama teknis, perlindungan hak kekayaan intelektual, pergerakan tenaga kerja, hingga program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi (Damuri dkk, 2019).

Pendekatan CEPA ini mencerminkan pergeseran strategi diplomasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang, terutama dalam merespons kompleksitas globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional. Jika FTA berfokus pada aspek tarif dan kuota, maka CEPA menekankan pada integrasi ekonomi yang lebih dalam serta

penyelarasan regulasi dan kerja sama strategis. Dalam konteks ini, CEPA menjadi cerminan dari transformasi peran Indonesia dalam perdagangan internasional, yakni dari sekadar mitra dagang menjadi aktor aktif yang mendorong kemitraan ekonomi berbasis nilai tambah (Rahardja, 2012). Dengan demikian, CEPA bukan hanya alat untuk meningkatkan ekspor, tetapi juga menjadi platform bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing domestik, menarik investasi berkualitas, dan meningkatkan keterlibatan dalam rantai pasok global.

Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian perdagangan ekonomi komprehensif CEPA, baik dalam bentuk multilateral maupun bilateral, sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat daya saing dan konektivitas ekonomi global. Dalam konteks multilateral, Indonesia berpartisipasi aktif melalui ASEAN dalam beberapa perjanjian besar, seperti ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-India CEPA, ASEAN-Japan CEPA, serta *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP sendiri mulai berlaku efektif pada tahun 2022 dan mencakup 15 negara, termasuk negara-negara besar seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Perjanjian ini mewakili sekitar 30% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan 32% perdagangan global, menjadikannya salah satu kerangka kerja ekonomi regional terbesar yang pernah ada (ASEAN Secretariat, 2020).

Namun, efektivitas perjanjian multilateral seringkali terbentur oleh kompleksitas koordinasi antarnegara anggota yang memiliki tingkat

pembangunan dan kepentingan ekonomi yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, perjanjian multilateral menuntut upaya simultan untuk memanfaatkan peluang ekspor (kepentingan ofensif) sekaligus melindungi industri domestik (kepentingan defensif) (Winanti, 2022). Disparitas ini menyebabkan implementasi perjanjian multilateral kerap berjalan lambat dan kurang adaptif terhadap kebutuhan nasional. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia melengkapi pendekatannya dengan menjalin CEPA bilateral, yang lebih fleksibel dan memungkinkan penyesuaian substansi perjanjian secara lebih spesifik terhadap prioritas pembangunan nasional (Medina, 2023).

Dari berbagai perjanjian CEPA yang telah diratifikasi oleh Indonesia, baik yang bersifat multilateral seperti RCEP maupun bilateral, terdapat tiga CEPA bilateral yang menonjol dalam konteks strategi diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, yaitu Indonesia–Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA), Indonesia–Australia CEPA (IA-CEPA), dan Indonesia–Korea CEPA (IK-CEPA). Ketiganya dipilih sebagai fokus kajian karena memiliki karakteristik yang sebanding dalam bentuk kerja sama bilateral yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan nasional, serta mengandung cakupan sektor yang luas dan strategis. Tidak seperti banyak perjanjian perdagangan lainnya yang hanya berorientasi pada liberalisasi tarif dan peningkatan volume ekspor-impor, ketiga CEPA tersebut mencerminkan arah baru dalam pendekatan diplomasi ekonomi

Indonesia yang lebih progresif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang (Winanti, 2022; Damuri dkk, 2019).

Salah satu pertimbangan utama dalam pemilihan ketiga CEPA ini adalah fokusnya yang tidak semata-mata pada keuntungan komersial jangka pendek, melainkan pada penciptaan nilai tambah domestik melalui penyediaan ruang bagi transfer teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta kerja sama teknis dan pendidikan. Dalam IA-CEPA, misalnya, Australia dan Indonesia menyepakati agenda kerja sama peningkatan keterampilan melalui *Skills Development Package* yang mencakup pelatihan vokasional, pertukaran keahlian, dan pendirian institusi pendidikan tinggi asing di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perjanjian ini dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi domestik Indonesia melalui peningkatan mutu tenaga kerja dan daya saing industri (DFAT, 2023; Pratama & Yuliana, 2022).

IK-CEPA tidak hanya mengatur penghapusan tarif, tetapi juga memuat komitmen transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM di sektor industri prioritas seperti otomotif dan energi baru terbarukan. Kerja sama ini melibatkan pelatihan teknis, investasi industri, dan pengembangan riset bersama, yang diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta Korea Selatan seperti Hyundai dan LG (Setiawan & Rachmawati, 2021; Winanti, 2022). Sementara itu, IJEPA sebagai CEPA bilateral pertama Indonesia juga menekankan aspek pengembangan SDM melalui program pelatihan kejuruan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta kerja sama industri

kecil dan menengah. Program seperti *IJEPA Human Resources Development Cooperation* menjadi bukti fokus perjanjian ini pada peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia untuk memenuhi standar industri Jepang (Sato, 2011).

Pemilihan ketiga CEPA sebagai fokus penelitian bukan semata didasarkan pada karakteristiknya sebagai perjanjian bilateral yang memungkinkan negosiasi yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan domestik, melainkan juga karena ketiganya merepresentasikan bentuk diplomasi ekonomi yang lebih terarah dan berorientasi pada transformasi struktural. Dalam kerangka kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia, pendekatan ini mencerminkan perubahan arah dari sekadar memperbesar nilai ekspor menuju strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif dan berkelanjutan (Damuri dkk, 2019; Winanti, 2022). Ketiga perjanjian tersebut mengadopsi kerangka kerja sama yang tidak hanya berfokus pada penghapusan hambatan perdagangan, tetapi juga berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui mekanisme alih teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan kapasitas inovasi. Hal ini selaras dengan visi pembangunan ekonomi nasional yang menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi melalui penguatan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi sebagai instrumen utama dalam menghadapi tantangan global (Bappenas, 2021).

Sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi memainkan peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di

tengah tatanan global yang semakin kompetitif dan saling terhubung. Diplomasi tidak lagi terbatas pada isu politik semata, melainkan telah bergeser menjadi alat penting dalam menjalin kerja sama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang (Hocking, 2019). Melalui diplomasi ekonomi, negara dapat mengupayakan pemanfaatan perjanjian internasional tidak hanya untuk memperluas akses pasar, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, dan kemandirian ekonomi nasional (Wisnumurti, 2011). Dalam konteks ini, perjanjian bilateral seperti CEPA menjadi medium yang memungkinkan Indonesia untuk menyisipkan kepentingan strategisnya dalam bentuk kerja sama non-tarif, seperti pengembangan SDM, alih teknologi, dan pembangunan sektor-sektor produktif domestik.

Diplomasi ekonomi memainkan peran kunci dalam mengarahkan strategi pembangunan nasional di tengah perubahan tatanan ekonomi global yang semakin kompleks. Fungsinya tidak semata-mata terbatas pada perluasan akses pasar atau peningkatan arus investasi asing, tetapi juga mencakup kemampuan negara untuk mengelola integrasi ekonomi secara strategis dan terarah. Bagi Indonesia, diplomasi ekonomi menjadi sarana untuk merumuskan kepentingan domestik melalui perjanjian internasional yang tidak hanya bersifat liberalisasi tarif, tetapi juga mencakup dimensi pembangunan seperti alih teknologi, penguatan pendidikan vokasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik, di mana

keunggulan suatu negara ditentukan oleh kualitas institusional, kemampuan inovasi, dan penguasaan teknologi, bukan semata pada angka perdagangan. Oleh karena itu, peran diplomasi ekonomi harus dipahami sebagai instrumen jangka panjang dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi (Dent, 2016).

Analisis mendalam terhadap efektivitas perjanjian bilateral menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana instrumen diplomasi ekonomi Indonesia mampu mendukung agenda pembangunan yang bersifat non-tarif. Pendekatan komparatif terhadap ketiga CEPA yang memiliki kerangka bilateral serupa dan orientasi pembangunan jangka panjang memungkinkan penilaian yang lebih terstruktur mengenai efektivitas masing-masing perjanjian dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional (Medina, 2023). Dengan membandingkan ketiganya, penelitian ini dapat mengidentifikasi model kerja sama yang paling efisien dan relevan untuk direplikasi atau disesuaikan dengan mitra strategis lainnya. Selain itu, kajian semacam ini juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan diplomasi ekonomi yang lebih adaptif dan visioner, sejalan dengan tuntutan integrasi ekonomi kawasan dan upaya peningkatan daya saing Indonesia secara berkelanjutan di level regional maupun global.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, yang menyoroti pentingnya peran diplomasi ekonomi dalam menghadapi dinamika global serta upaya Indonesia dalam memperkuat posisi melalui berbagai kerja sama ekonomi komprehensif, maka penelitian ini secara

khusus diarahkan untuk mengkaji perbandingan strategi yang diterapkan Indonesia dalam konteks tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung judul *“Perbandingan Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Pada Kerjasama Komprehensif di Kawasan Indo-Pasifik Studi Kasus : IK-CEPA, IA-CEPA, dan IJEPA”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini berfokus pada analisis komparatif strategi diplomasi ekonomi Indonesia melalui kerja sama ekonomi komprehensif dengan tiga mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik: Korea Selatan, Australia, dan Jepang. Ketiga negara dipilih karena memiliki hubungan ekonomi yang erat dan menjadi bagian penting dalam penguatan kerja sama bilateral melalui skema CEPA, yang tidak hanya mencakup liberalisasi perdagangan, tetapi juga mencakup alih teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan kapasitas inovasi nasional.

Penelitian ini dibatasi pada periode 2019–2024 untuk menangkap dinamika kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia yang terkini. Rentang waktu ini mencerminkan fase penting dalam perluasan pasar, peningkatan investasi asing, dan penguatan daya saing nasional.

Adapun rumusan masalah yang diangkat:

1. Bagaimana perbandingan bentuk diplomasi ekonomi Indonesia dalam kerja sama IK-CEPA, IA-CEPA, dan IJEPA?

2. Bagaimana perbandingan dampak implementasi diplomasi ekonomi Indonesia dalam ketiga kerja sama CEPA tersebut?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan bentuk implementasi strategi diplomasi ekonomi Indonesia pada kerjasama ekonomi komprehensif IK-CEPA, IA-CEPA, dan IJEPA
2. Untuk mengetahui perbandingan dampak implementasi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap kerjasama ekonomi komprehensif IK-CEPA, IA-CEPA, dan IJEPA

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam bagi penulis mengenai perbandingan implementasi diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik khususnya IK-CEPA, IA-CEPA, dan IJEPA

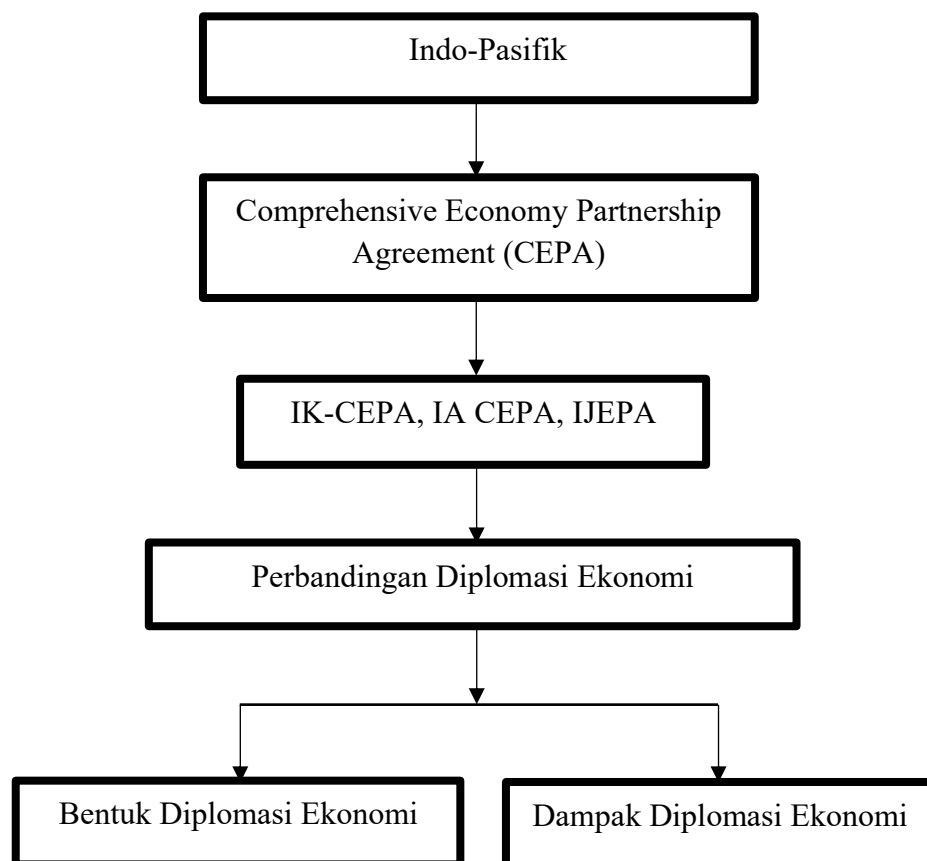
2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan informasi dan sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel di dalam penelitian serta untuk memperoleh data empiris tentang strategi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap kerja sama ekonomi komprehensif di kawasan Indo-Pasifik yang akan bermanfaat untuk

megembangkan ilmu pengetahuan, dan akademis mahasiswa di dalam bidang hubungan Internasional

1.4. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data-data berupa bukti empiris Perbadninan Diplomasi Ekonomi Indonesia Pada Kerja Sama Ekonomi Komprehensif di Kawasan Indo-Pasifik. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk memudahkan jalan pemikiran terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

1.4.1. Kerjasama Internasional

Konsep kerja sama internasional merupakan fondasi penting dalam studi hubungan internasional modern karena mencerminkan interaksi kompleks antarnegara dalam mencapai tujuan bersama. Menurut K. J. Holsti (2022), kerja sama internasional merupakan pertemuan antara dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang menghasilkan kesepakatan dan dipromosikan bersama oleh para pihak yang terlibat. Pandangan ini menunjukkan bahwa harapan suatu negara dirumuskan dalam kebijakan kolektif yang didukung oleh negara lain yang memiliki nilai dan tujuan sejalan.

Sementara itu, Robert Keohane (2012) menekankan bahwa kerja sama internasional terjadi ketika negara-negara menyesuaikan kebijakan mereka melalui koordinasi, karena kebijakan yang diambil satu pihak dapat menjadi hambatan bagi pihak lain. Hal ini mengarah pada penyesuaian sikap untuk mencapai keuntungan bersama, meskipun tidak selalu setara. Dalam hal ini, kerja sama internasional berpijak pada dua prinsip utama: bahwa perilaku negara rasional dipandu oleh kepentingan masing-masing, dan bahwa kerja sama yang terbentuk bersifat saling menguntungkan.

Dalam pendekatan liberal institusional, seperti yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye (2012), kerja sama internasional terjadi karena negara-negara menyadari bahwa melalui institusi dan mekanisme aturan bersama, mereka dapat mengurangi

ketidakpastian dan memperbesar kemungkinan tercapainya keuntungan bersama, meskipun masing-masing negara tetap bertindak berdasarkan kepentingan rasionalnya. Kerja sama internasional dalam hal ini bukan sekadar kompromi sementara, tetapi merupakan hasil dari proses penyesuaian kebijakan yang saling menguntungkan dan bersifat jangka panjang (Keohane, 1984). Oleh karena itu, eksistensi institusi internasional seperti perjanjian, forum bilateral, hingga organisasi multilateral menjadi penting sebagai media untuk mengatur perilaku negara dan mencegah konflik yang bersumber dari perbedaan kepentingan.

Fungsi kerja sama internasional mencakup berbagai dimensi strategis, mulai dari penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan pembangunan, hingga penciptaan stabilitas politik, perlindungan lingkungan global, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka teori hubungan internasional, kerja sama ini tidak hanya dilihat sebagai tindakan kolektif yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai mekanisme instrumental yang digunakan negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Perspektif realis, sebagaimana dijelaskan oleh Kenneth Waltz (2019), menyatakan bahwa meskipun kerja sama antarnegara bersifat rapuh karena sistem internasional yang anarkis, negara tetap memilih berkoordinasi dalam isu-isu tertentu untuk mempertahankan keamanan dan

keseimbangan kekuatan. Kerja sama, dalam hal ini, menjadi sarana strategis untuk membatasi dominasi negara lain dan mempertahankan otonomi dalam menghadapi ketidakpastian global.

Lebih lanjut, pendekatan neorealis menekankan bahwa negara bersedia untuk bekerja sama hanya jika hasil yang dicapai dapat memperkuat posisi relatif mereka terhadap negara lain (Grieco, 2022). Artinya, kerja sama bukan semata-mata untuk mencapai keuntungan absolut, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan relatif dalam dinamika kekuasaan. Sementara itu, pendekatan liberal seperti yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye (2012) berargumen bahwa kerja sama internasional menjadi semakin penting dalam dunia yang saling terhubung melalui interdependensi kompleks. Mereka menyoroti peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama jangka panjang, mengurangi ketidakpastian, serta membangun kepercayaan antarnegara.

Dalam konteks kontemporer, kerja sama internasional juga memiliki fungsi penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional melalui alih teknologi, integrasi rantai pasok global, dan diversifikasi mitra dagang (Acharya, 2023). Selain itu, kerja sama dapat meningkatkan posisi tawar negara berkembang dengan memberi mereka akses terhadap pendanaan, pengetahuan, dan infrastruktur pembangunan yang tidak selalu dapat dijangkau secara mandiri. Oleh karena itu, kerja sama internasional kini tidak hanya

dipandang sebagai instrumen politik, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan dan inklusif dalam sistem global yang semakin kompetitif.

Kerja sama bilateral merupakan bentuk interaksi yang terjadi antara dua negara yang memiliki kepentingan saling melengkapi. Model ini dinilai paling efisien dalam menjawab kebutuhan spesifik karena proses negosiasi dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara langsung, fleksibel, serta terfokus pada isu-isu yang disepakati bersama (Baylis, Smith, & Owens, 2020). Dalam konteks ekonomi, kerja sama bilateral memungkinkan kedua negara untuk menyesuaikan kerangka kebijakan berdasarkan kondisi domestik masing-masing, sehingga implementasinya lebih cepat dan responsif terhadap dinamika pasar. Keunggulan inilah yang menjadikan kerja sama bilateral sebagai salah satu bentuk utama dari strategi diplomasi ekonomi yang kerap diadopsi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kerja sama regional, di sisi lain, melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan geografis atau yang memiliki kepentingan ekonomi-politik yang serupa. Contohnya dapat ditemukan pada ASEAN, Uni Eropa, atau African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kohesi ekonomi, keamanan, dan sosial budaya antaranggota kawasan, serta meningkatkan posisi tawar kolektif di kancah global. Meskipun

memiliki keuntungan dalam skala ekonomi dan penguatan solidaritas kawasan, kerja sama regional sering kali menghadapi tantangan berupa disparitas tingkat pembangunan dan preferensi kebijakan antarnegara anggota (Mattli, 2021).

Kerja sama multilateral melibatkan lebih banyak aktor negara dalam forum global, seperti World Trade Organization (WTO), United Nations (UN), atau G20. Bentuk kerja sama ini memiliki cakupan yang luas dan prinsip dasar non-diskriminasi serta konsensus. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas internasional, menyelesaikan isu lintas batas (seperti perubahan iklim dan keamanan pangan), dan membangun rezim global yang dapat mengatur perilaku negara. Namun, efektivitas kerja sama multilateral kerap terhambat oleh perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan kekuatan antara negara maju dan berkembang, serta kompleksitas proses pengambilan keputusan (Ruggie, 2022).

Meskipun berbeda dalam skala dan kompleksitas, ketiga bentuk kerja sama internasional ini memiliki satu tujuan utama yang sama, yaitu menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dalam sistem internasional yang anarkis, serta mendorong negara-negara untuk membangun mekanisme saling ketergantungan yang damai dan saling menguntungkan. Seiring dengan meningkatnya tantangan global dan saling keterhubungan ekonomi, kerja sama internasional dalam bentuk apa pun semakin menjadi instrumen penting dalam

menjaga stabilitas, memajukan pembangunan, dan mengelola ketegangan geopolitik secara kolektif (Acharya, 2023).

Kerja sama bilateral dalam diplomasi kerap dipilih karena memungkinkan negosiasi yang lebih terarah dan sesuai dengan kepentingan strategis masing-masing negara. Menurut Keohane (1984), bentuk kerja sama ini lebih efektif untuk menangani isu sektoral dibanding mekanisme multilateral. Dengan demikian, kerja sama bilateral tidak hanya memiliki dasar teoritis yang kuat, tetapi juga relevansi praktis dalam mendorong pembangunan dan diplomasi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Pembahasan lebih lanjut mengenai konsep dan karakteristik kerja sama ini akan dijelaskan dalam tinjauan pustaka sebagai dasar analisis perbandingan CEPA Indonesia dengan negara mitra.

1.4.2. Diplomasi Ekonomi

Dalam praktik hubungan internasional modern, diplomasi telah mengalami transformasi dari sekadar aktivitas politik tradisional menjadi sarana strategis multidimensi yang mencakup berbagai sektor, termasuk ekonomi, perdagangan, dan pembangunan. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya keterkaitan global dan kompleksitas sistem internasional, yang mendorong negara-negara untuk memperluas orientasi diplomatik mereka ke bidang ekonomi guna menjawab tantangan dan peluang globalisasi (Bayne & Woolcock, 2017).

Salah satu bentuk evolusi diplomasi tersebut adalah diplomasi ekonomi, yakni suatu strategi di mana negara menggunakan instrumen hubungan luar negerinya untuk mencapai tujuan ekonomi nasional, seperti memperluas ekspor, menarik investasi asing langsung (FDI), memperkuat kerja sama teknologi, serta meningkatkan daya saing sektor domestik di pasar global. Diplomasi ekonomi mencerminkan pergeseran fokus dari diplomasi tradisional yang bersifat politik atau keamanan ke diplomasi yang berbasis pada kepentingan pembangunan ekonomi (Rana, 2020).

Menurut OECD (2022), diplomasi ekonomi kini menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri banyak negara berkembang dan maju karena diyakini dapat menciptakan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Negara-negara menggunakan jaringan diplomatiknya—seperti kedutaan besar, konsulat, dan kantor perdagangan luar negeri—untuk mempromosikan produk dan jasa nasional, mendorong kerja sama riset dan pengembangan, serta menjalin perjanjian dagang yang dapat membuka akses pasar yang lebih luas.

Lebih dari itu, diplomasi ekonomi juga memainkan peran penting dalam konteks geopolitik dan transformasi digital. Negara-negara seperti Indonesia menghadapi tuntutan untuk meningkatkan posisi tawarnya di tengah kompetisi global, dan hal ini tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan militer atau diplomasi politik

semata. Melainkan, melalui diplomasi ekonomi, negara dapat memperkuat posisi strategisnya melalui keterlibatan dalam rantai nilai global, peningkatan kapasitas produksi nasional, dan integrasi pasar tenaga kerja dan digital (UNCTAD, 2023).

Dalam konteks Indonesia, diplomasi ekonomi menjadi semakin signifikan terutama dalam mendorong pemulihan pascapandemi, mempercepat transformasi industri, serta meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan terus mengarahkan upaya diplomatik untuk mendukung program prioritas nasional seperti hilirisasi industri, ekonomi digital, dan pembangunan berkelanjutan (Kementerian Luar Negeri RI, 2023).

Diplomasi ekonomi juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui diversifikasi mitra dagang dan investasi. Misalnya, dengan menjalin perjanjian perdagangan bebas komprehensif seperti CEPA, Indonesia tidak hanya menghapus hambatan tarif dan non-tarif, tetapi juga memperluas cakupan kerja sama ke bidang ketenagakerjaan, teknologi, pendidikan, dan pembangunan kapasitas. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi bukan hanya alat untuk meningkatkan perdagangan, melainkan juga sebagai sarana pembangunan struktural jangka panjang (World Trade Organization, 2023).

Dengan demikian, diplomasi ekonomi harus dipahami sebagai pilar utama dalam kebijakan luar negeri yang modern, karena menyatukan dimensi ekonomi, politik, dan pembangunan secara integral. Strategi ini sangat relevan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang ingin mengoptimalkan integrasi global tanpa mengorbankan kepentingan domestik. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Lee & Smith (2022) juga menegaskan bahwa diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dengan baik dapat meningkatkan indikator makroekonomi nasional secara signifikan, terutama jika didukung dengan kebijakan industri dan pendidikan yang progresif.

Diplomasi ekonomi dewasa ini tidak hanya dilihat sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional semata, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membentuk persepsi dan citra negara di tingkat global. Dalam perspektif ini, diplomasi ekonomi memiliki dimensi *soft power*, yakni kekuatan untuk memengaruhi aktor lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan yang dianggap menarik dan kredibel, ketimbang menggunakan tekanan militer atau koersif. Konsep *soft power* yang dikembangkan oleh Joseph Nye (2004) menggarisbawahi pentingnya legitimasi dan daya tarik sebagai sumber kekuatan dalam hubungan internasional. Dalam konteks diplomasi ekonomi, ini tercermin melalui berbagai bentuk kerja sama seperti penyaluran bantuan pembangunan,

promosi perdagangan dan investasi, serta partisipasi aktif dalam organisasi multilateral. Melalui inisiatif-inisiatif ini, suatu negara dapat membangun kepercayaan, meningkatkan kredibilitas internasional, dan memperluas pengaruhnya dalam tatanan global (Nye, 2004).

Lebih lanjut, negara-negara yang menunjukkan komitmen tinggi dalam kerja sama ekonomi, utamanya yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan mitra, cenderung memperoleh reputasi sebagai mitra yang dapat diandalkan. Hal ini pada akhirnya memperkuat posisi diplomatik negara tersebut dan membuka peluang kerja sama lintas sektor yang lebih luas. Seperti yang dijelaskan oleh Lee dan Ayhan (2015), *soft power* dalam konteks diplomasi ekonomi bukan hanya berfungsi sebagai alat persuasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antarnegara.

Sejalan dengan pendekatan ini, munculnya paradigma *network diplomacy* telah memperluas cakupan dan aktor dalam praktik diplomasi ekonomi modern. *Network diplomacy* menekankan pentingnya membangun jejaring kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor non-negara, seperti sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, serta lembaga internasional. Hal ini mencerminkan bahwa diplomasi kontemporer tidak lagi eksklusif bersifat antarpemerintah (*state-centric*), melainkan

terbuka, dinamis, dan berjejaring lintas sektor (Melissen & Caesar-Gordon, 2023). Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks globalisasi dan kompleksitas ekonomi global saat ini, di mana berbagai aktor memiliki peran signifikan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, khususnya dalam isu perdagangan, investasi, dan teknologi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menunjukkan adaptasi progresif terhadap paradigma *network diplomacy* dalam pelaksanaan strategi diplomasi ekonominya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara aktif memanfaatkan forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, APEC, serta mekanisme bilateral dan regional seperti CEPA untuk mengukuhkan posisi ekonominya sekaligus membangun reputasi sebagai aktor global yang kooperatif dan berdaya saing. Misalnya, dalam forum G20, Indonesia telah menginisiasi berbagai agenda penting, seperti ekonomi berkelanjutan, transformasi digital, serta ketahanan energi dan pangan yang semuanya tidak hanya mencerminkan kepentingan nasional, tetapi juga menunjukkan kapasitas Indonesia dalam berkontribusi terhadap solusi global (Sasongko, 2022).

1.4.3. Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) merupakan bentuk kerja sama ekonomi tingkat lanjut yang

dirancang untuk menjawab tantangan kompleksitas hubungan ekonomi antarnegara dalam era globalisasi. Tidak seperti perjanjian perdagangan bebas biasa (FTA) yang terbatas pada penghapusan tarif dan hambatan non-tarif atas barang, CEPA menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek ekonomi strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, pembangunan sumber daya manusia, serta kerja sama teknologi dan inovasi (Liling, 2020; Nasional & HAM, 2020). Dengan cakupan multidimensi tersebut, CEPA bukan hanya memperluas akses pasar, tetapi juga bertujuan membangun fondasi jangka panjang bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu fungsi utama dari CEPA adalah menciptakan kerangka kerja sama ekonomi yang bersifat mutualistik, yaitu memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan ekonomi masing-masing negara. Melalui pengurangan hambatan perdagangan, liberalisasi sektor jasa, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif, CEPA memungkinkan negara-negara mitra untuk meningkatkan daya saing global dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik secara berkelanjutan (Siwiyanti, 2024). CEPA juga menjadi sarana penting bagi negara-negara berkembang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur perdagangan, memperkuat

rantai pasok, serta memanfaatkan integrasi ekonomi regional dan global secara lebih optimal.

Perkembangan mutakhir dari kerangka CEPA menunjukkan bahwa perjanjian ini telah berevolusi dari sekadar instrumen ekonomi menjadi platform strategis untuk menyelaraskan agenda-agenda global seperti pembangunan berkelanjutan, transisi energi bersih, serta digitalisasi. Perjanjian CEPA modern umumnya memuat ketentuan yang mendukung prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), seperti pengurangan emisi karbon, adaptasi perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab (Fattah, 2023; Lee & Taylor, 2021). Dengan demikian, CEPA tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan dalam kerangka keberlanjutan.

Selain itu, di era transformasi digital saat ini, CEPA juga mengakomodasi kerja sama dalam pengembangan sektor teknologi tinggi dan inovasi digital. Negara-negara yang menandatangani CEPA semakin aktif memanfaatkan kerja sama ini untuk memperkuat kapabilitas digital nasional, baik dalam bidang e-commerce, layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), maupun pengembangan sistem teknologi informasi yang menunjang efisiensi ekonomi. Perjanjian seperti IA-CEPA dan IK-CEPA misalnya, telah mengatur bidang kerja sama dalam riset dan pengembangan

teknologi, mobilitas tenaga kerja profesional, serta pendidikan vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif di sektor teknologi dan industri masa depan (Nguyen & Huang, 2022; Kemlu RI, 2023).

Adopsi skema CEPA juga mencerminkan upaya strategis negara-negara untuk memperkuat posisi mereka di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif. Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Australia termasuk di antara negara yang memanfaatkan CEPA untuk memperluas jaringan perdagangan sekaligus membangun hubungan ekonomi jangka panjang yang berbasis pada prinsip saling menguntungkan dan berkelanjutan. Sebagai contoh, Indonesia menggunakan CEPA untuk membuka akses produk ekspor unggulan ke pasar negara mitra, mendorong aliran investasi asing langsung (FDI), dan meningkatkan transfer teknologi dalam sektor strategis seperti manufaktur, energi, serta ekonomi kreatif (Sasongko, 2022; OECD, 2023).

CEPA juga terbukti memberikan fleksibilitas bagi negara peserta dalam merancang strategi pembangunan ekonomi nasional. Karena sifatnya yang adaptif terhadap kondisi domestik masing-masing pihak, CEPA memberi ruang bagi negara-negara berkembang untuk melindungi sektor-sektor sensitif, sembari secara bertahap memperluas keterlibatan dalam pasar global. Ini menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam konteks ketidakpastian

ekonomi global, di mana negara perlu membangun sistem ekonomi yang tangguh, inovatif, dan berbasis kolaborasi internasional.

Peran CEPA tidak terbatas pada peningkatan volume perdagangan, tetapi juga sebagai medium diplomasi ekonomi untuk memperkuat posisi strategis suatu negara dalam peta ekonomi internasional. Keunggulan dari perjanjian ini terletak pada fleksibilitas dan kedalamannya dalam menjangkau berbagai dimensi pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun teknologi. Oleh karena itu, memahami CEPA secara menyeluruh menjadi krusial bagi analisis hubungan ekonomi bilateral dan regional. Adapun cara kerja, aturan main, serta skema implementasi dari perjanjian CEPA akan dibahas lebih lanjut dalam bagian *tinjauan pustaka*, guna memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai struktur kelembagaan, mekanisme negosiasi, dan instrumen implementatif yang digunakan dalam perjanjian ini

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Data merupakan unsur penting dalam penelitian yang berisi fakta-fakta yang ada, dan untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, diperlukan pengujian kebenarannya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan memanfaatkan data yang diperoleh peneliti dari sejumlah literatur dalam menganalisis perbandingan diplomasi ekonomi Indonesia pada kerjasama CEPA

di kawasan Indo-Pasifik. Menurut Sugiyono (2013) data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan gambar. Data yang berupa kata-kata atau gambar diperoleh dari situs website, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Tujuan dari penelitian data kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan maupun fenomena.

1.5.2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah disusun sebelumnya (Maisaroh, 2019). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder dalam bentuk dokumentasi, arsip tertulis, serta buku yang berkaitan dengan Perbandingan Diplomasi Ekonomi Indonesia pada Kerja Sama Ekonomi Komprehensif di Kawasan Indo-Pasifik dengan membaca, meninjau, dan menelaah sumber data tersebut.

1.5.3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa *library research* (studi pustaka). Metode ini dapat dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mengumpulkan data melalui jurnal ilmiah, buku, berita, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya mengenai strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan

Indonesia terhadap Korea, Australia, dan Jepang sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Peneliti akan menggunakan sumber data terbaru yang berkaitan dengan penelitian. Akan tetapi jika terdapat sumber yang sudah lama terbit namun masih dianggap relevan, maka penulis akan tetap memanfaatkan sumber tersebut sebagai tambahan untuk menyempurnakan analisis dalam penelitian.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan menyusun dan mengolah data berdasarkan teori yang sesuai untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan strategi diplomasi ekonomi Indonesia serta dampaknya terhadap kerja sama dengan ketiga negara tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan argumen yang tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan mengkaji tiga konsep utama yang akan digunakan sebagai landasan dari penelitian ini, diantaranya yaitu kerjasama internasional, diplomasi ekonomi, dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Bab ini akan menguraikan mengenai ketiga konsep tersebut sekaligus memberikan pemahaman mengenai diplomasi ekonomi Indonesia dalam kerangka kerja sama ekonomi komprehensif di kawasan Indo-pasifik dalam konteks hubungan internasional. Pada bab ini, penulis juga akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh landasan teori yang dapat mengidentifikasi celah-celah penelitian yang dijadikan sebagai acuan dari penelitian ini

2.1. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan bentuk interaksi formal antara dua negara yang dirancang secara langsung dan terfokus untuk mencapai tujuan bersama melalui mekanisme negosiasi, perjanjian, dan pelaksanaan kebijakan yang disepakati. Bentuk kerja sama ini menjadi elemen dasar dalam arsitektur hubungan internasional karena kemampuannya untuk menyesuaikan agenda dan kebijakan luar negeri dengan lebih cepat dan efektif tanpa memerlukan konsensus multilateral yang kompleks (Baylis, Smith, & Owens, 2020). Dalam banyak hal, kerja sama bilateral berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan domestik dan internasional secara pragmatis.

Karakter utama dari kerja sama bilateral adalah eksklusivitas hubungan yang terbentuk antara dua negara. Hubungan ini memungkinkan proses komunikasi yang intensif, diplomasi yang lebih terkontrol, dan kesepakatan yang bersifat tailor-made, yaitu dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing negara. Berbeda dengan kerja sama multilateral yang sering terhambat oleh perbedaan kepentingan banyak pihak, kerja sama bilateral memberikan ruang yang lebih besar bagi fleksibilitas dan improvisasi dalam penyusunan isi perjanjian, baik dari segi isu, tahapan implementasi, maupun mekanisme penyelesaiannya (Ravenhill, 2023).

Secara konseptual, teori liberal institusional memandang kerja sama bilateral sebagai produk dari meningkatnya saling ketergantungan antarnegara akibat globalisasi dan pertumbuhan ekonomi lintas batas. Keohane dan Nye (2012) menjelaskan bahwa negara-negara akan cenderung membangun kerja sama melalui institusi dan norma internasional untuk mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya transaksi, dan membangun kepercayaan. Dalam hubungan bilateral, hal ini terwujud melalui pembentukan komite bersama, forum konsultasi periodik, dan lembaga penyelesaian sengketa yang berfungsi sebagai pengaman keberlanjutan perjanjian.

Di tengah konstelasi global yang makin kompleks dan penuh ketidakpastian, kerja sama bilateral menjadi sarana strategis yang diandalkan oleh banyak negara untuk melindungi dan memajukan

kepentingan nasionalnya. Krisis geopolitik, gangguan rantai pasok, perang dagang, serta meningkatnya fragmentasi sistem ekonomi global telah mendorong negara-negara untuk membangun hubungan bilateral yang lebih solid guna memastikan keberlanjutan akses pasar, stabilitas hukum investasi, dan keamanan pasokan teknologi serta energi (OECD, 2023; UNCTAD, 2023). Dalam konteks ini, kerja sama bilateral diposisikan bukan hanya sebagai pelengkap dari kerja sama multilateral, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri berbasis kepentingan nasional.

Dalam praktiknya, kerja sama bilateral dapat mencakup berbagai bentuk dan sektor, mulai dari perdagangan bebas, investasi langsung, perlindungan hak kekayaan intelektual, kerja sama pendidikan dan teknologi, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan. Fleksibilitas inilah yang menjadikan kerja sama bilateral sangat adaptif terhadap dinamika domestik dan perubahan lingkungan global (UN ESCAP, 2023). Selain itu, dalam banyak kasus, kerja sama bilateral bersifat progresif dan dinamis, di mana keberhasilan di satu sektor dapat menjadi landasan untuk memperluas kolaborasi ke sektor lain, sebuah fenomena yang dalam teori dikenal sebagai *spillover effect* (Kinne & Peinhardt, 2023).

Indonesia, dalam hal ini, menjadikan kerja sama bilateral sebagai bagian sentral dari strategi diplomasi ekonomi dan pembangunan nasional jangka panjang. Melalui skema CEPA, Indonesia membangun hubungan yang komprehensif dengan negara-negara mitra strategis seperti Jepang,

Korea Selatan, Australia, dan Uni Emirat Arab. Skema CEPA melampaui perdagangan barang dan jasa dengan mencakup kerja sama kelembagaan, investasi, pembangunan kapasitas, dan bahkan transfer teknologi (Kemlu RI, 2023; Bappenas, 2024). Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan transformasi ekonomi melalui integrasi global yang lebih berkualitas.

Kerja sama bilateral juga memiliki dimensi kelembagaan yang semakin kompleks. Sebuah perjanjian bilateral yang efektif umumnya dilengkapi dengan struktur kelembagaan seperti komite gabungan, forum konsultatif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai sarana evaluasi, koordinasi, serta penanganan isu-isu teknis yang muncul selama implementasi perjanjian. Dengan demikian, institusionalisasi kerja sama bilateral memainkan peran krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang (UNCTAD, 2023).

Dalam kerangka teoritik yang lebih mutakhir, model *bilateral treaty networks* menekankan pentingnya melihat kerja sama bilateral sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung dan dapat memunculkan efek penguatan lintas sektor dan lintas kawasan. Kinne dan Peinhardt (2023) menekankan bahwa suatu perjanjian bilateral yang sukses di bidang perdagangan, misalnya, dapat menjadi fondasi terbentuknya kerja sama di bidang pertahanan, lingkungan hidup, atau teknologi digital. Oleh karena itu, kerja sama bilateral tidak hanya harus dilihat dari aspek ekonomi

semata, tetapi juga sebagai landasan strategis pembangunan dan diplomasi negara dalam jangka panjang.

Bagi Indonesia, kerja sama bilateral berfungsi sebagai kendaraan utama untuk mendukung transformasi ekonomi struktural yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam perjanjian bilateral seperti IA-CEPA (Indonesia–Australia), IK-CEPA (Indonesia–Korea), dan IJEPA (Indonesia–Jepang), Indonesia tidak hanya menegosiasikan pembukaan pasar ekspor, tetapi juga memanfaatkan kerja sama tersebut untuk mempercepat reformasi domestik, meningkatkan daya saing industri nasional, dan menarik investasi berkualitas tinggi (Fattah, 2023). Strategi ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral telah menjadi elemen penting dalam arsitektur diplomasi ekonomi Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia yang dinamis dan kompetitif.

2.2. Diplomasi Ekonomi

Dalam perkembangan hubungan internasional modern, bentuk-bentuk diplomasi ekonomi tidak hanya menunjukkan keragaman fungsi, tetapi juga menandakan adanya pendekatan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan konteks strategis masing-masing negara. Diplomasi ekonomi kini tidak lagi sekadar dimaknai sebagai promosi perdagangan, melainkan mencakup pendekatan yang lebih luas dan multidimensional. Salah satu pendekatan utama adalah diplomasi komersial, yang bertujuan untuk mendukung ekspansi ekonomi suatu negara melalui promosi ekspor, peningkatan investasi langsung luar negeri (FDI), serta pembukaan pasar

baru bagi produk nasional. Pendekatan ini banyak diterapkan melalui peran kedutaan besar dan perwakilan dagang yang secara aktif menjembatani hubungan antara pelaku usaha domestik dan mitra internasional. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya jejaring bisnis internasional yang melibatkan institusi keuangan, kamar dagang, hingga diaspora ekonomi (Okano-Heijmans, 2021).

Pendekatan lainnya adalah diplomasi perdagangan, yang berfokus pada keterlibatan dalam perundingan formal untuk membentuk perjanjian ekonomi seperti FTA, CEPA, atau perjanjian multilateral di bawah WTO. Diplomasi ini sangat teknokratis dan menuntut kapasitas negosiasi tinggi karena menyangkut kepentingan nasional dalam jangka panjang. Negara-negara menggunakan pendekatan ini untuk mengakses pasar global secara lebih adil dan terstruktur, dengan menegosiasikan penghapusan tarif, standar teknis, atau hak kekayaan intelektual yang berdampak pada ekspor domestik (Woolcock, 2022). Di samping itu, pendekatan ini juga melibatkan proses harmonisasi regulasi agar produk dan jasa dapat masuk ke pasar negara mitra tanpa hambatan teknis yang berlebihan.

Kemudian terdapat diplomasi keuangan, yaitu bentuk diplomasi yang menekankan stabilitas makroekonomi dan integrasi sistem keuangan internasional. Diplomasi ini lazimnya melibatkan aktor-aktor seperti bank sentral, kementerian keuangan, dan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, atau OECD. Pendekatan ini menjadi penting terutama bagi negara berkembang dalam mengamankan dukungan pembiayaan luar

negeri, mengelola utang publik, serta mendapatkan akses ke pasar modal internasional. Diplomasi keuangan juga semakin berperan dalam isu-isu kontemporer seperti pendanaan iklim, kerangka pajak global, dan upaya mitigasi krisis keuangan (Zhang & Gao, 2023; OECD, 2024). Dalam praktiknya, negara yang memiliki stabilitas politik dan kredibilitas ekonomi yang baik cenderung memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam diplomasi ini.

Bentuk berikutnya adalah diplomasi migrasi dan konsuler, yang secara fungsional mengatur arus mobilitas manusia, baik migrasi tenaga kerja, pelajar, maupun diaspora. Dalam konteks ekonomi, pendekatan ini penting karena berkaitan dengan remitansi, perlindungan tenaga kerja migran, serta pengelolaan sumber daya manusia lintas negara. Diplomasi ini juga mencakup penyusunan skema kerja sama bilateral dalam bentuk perjanjian penempatan tenaga kerja, pengakuan kualifikasi profesional, serta perlindungan hukum warga negara di luar negeri (Peters & Hall, 2024). Secara strategis, pendekatan ini memperkuat citra negara sekaligus mengintegrasikan diaspora sebagai aset ekonomi dan diplomatik.

Diplomasi ekonomi telah berkembang menjadi instrumen strategis yang tidak hanya melibatkan negosiasi antar pemerintah, tetapi juga mencakup keterlibatan berbagai aktor dan beragam pendekatan. Berbagai pendekatan ini digunakan sesuai dengan tujuan nasional, kondisi domestik, serta dinamika global yang dihadapi oleh masing-masing negara (Melissen & Caesar-Gordon, 2023).

1) Top-Down Diplomacy

Pendekatan ini bersifat hierarkis, di mana arah kebijakan diplomasi ekonomi ditentukan oleh pejabat tinggi negara seperti presiden, perdana menteri, atau kementerian terkait, kemudian diteruskan ke lembaga pelaksana. Strategi ini banyak digunakan oleh negara dengan struktur pemerintahan sentralistik atau yang memiliki agenda nasional jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, industrialisasi, atau transformasi digital. (Fattah, 2023; Lee & Taylor, 2023).

2) Bottom-Up Diplomacy

Berbeda dari pendekatan sebelumnya, model bottom-up melibatkan aktor lokal dan masyarakat sipil dalam membentuk arah diplomasi ekonomi. Pemerintah daerah, pelaku UMKM, diaspora, serta komunitas bisnis memiliki peran dalam mendorong agenda ekspor, promosi pariwisata, atau kerja sama antar kota. Pendekatan ini dianggap efektif dalam meningkatkan inklusi dan responsivitas kebijakan karena berasal dari kebutuhan nyata di lapangan (Chong & Wong, 2019).

3) Track I Diplomacy

Ini merupakan bentuk paling konvensional dari diplomasi ekonomi, di mana negosiasi dan kesepakatan perdagangan dilakukan oleh aktor resmi negara seperti kementerian luar negeri dan perdagangan. Fokus utamanya adalah membentuk kerangka hukum yang mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi (Peterson & Anderson, 2022).

4) Track II dan Multi-Track Diplomacy

Track II diplomacy melibatkan aktor non-negara seperti akademisi, think-tank, dan organisasi masyarakat dalam menyusun dialog kebijakan ekonomi lintas negara. Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi *multi-track diplomacy*, yaitu pendekatan yang menggabungkan jalur resmi dan tidak resmi dalam satu kerangka sinergis. Strategi ini penting dalam membangun konsensus di bidang ekonomi berkelanjutan, transformasi digital, dan energi hijau, di mana diperlukan keterlibatan lintas aktor secara simultan (Melissen & Caesar-Gordon, 2023).

5) *Development-Oriented Economic Diplomacy*

Pendekatan ini memfokuskan pada pembangunan ekonomi nasional, khususnya di negara berkembang yang membutuhkan dukungan teknis, pendanaan, dan teknologi. Program kerja sama seperti bantuan luar negeri, pinjaman lunak, serta transfer teknologi menjadi instrumen utama dalam model ini. Lembaga seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) kerap menjadi mitra dalam diplomasi pembangunan (OECD, 2024).

6) *Strategic Partnership Diplomacy*

Model ini menekankan pembentukan kemitraan jangka panjang dalam sektor sektor kunci seperti energi, pertahanan, teknologi, dan pendidikan. Melalui pendekatan ini, negara berupaya membentuk kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam transfer teknologi dan riset bersama. Sebagai contoh, kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam proyek jet tempur IFX/KFX menunjukkan upaya kedua

negara untuk mendorong kolaborasi teknologi dan industri strategis (Kusumawardhana, 2023).

7) *Issue-Based Economic Diplomacy*

Jenis pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap isu-isu global kontemporer seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan digitalisasi. Negara-negara mengembangkan aliansi atau perjanjian yang berfokus pada satu isu spesifik untuk mendorong kerja sama tematik lintas negara. Contohnya adalah *Just Energy Transition Partnership* (JETP), yang menjadi instrumen bagi Indonesia dalam mendorong pembiayaan transisi energi bersama negara-negara mitra (OECD, 2024).

Secara keseluruhan, pendekatan-pendekatan dalam diplomasi ekonomi bersifat fleksibel dan adaptif, tergantung pada kebutuhan dan kapasitas masing-masing negara. Strategi yang digunakan tidak selalu eksklusif, karena dalam praktiknya sebuah negara dapat menggabungkan berbagai pendekatan secara simultan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan memperluas pengaruh globalnya. Pemahaman mendalam terhadap tiap pendekatan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang responsif, inklusif, dan berdampak.

2.3. *Comprehensive Economy Partnership Agreement (CEPA)*

CEPA umumnya dibangun atas prinsip resiprositas dan transparansi, di mana kedua belah pihak bersepakat untuk memberikan manfaat timbal balik. Selain itu, perjanjian ini mencerminkan perubahan arah kebijakan ekonomi global yang kini lebih memperhatikan isu-isu non-ekonomi

seperti perlindungan lingkungan, standar ketenagakerjaan, dan kesetaraan gender. Hal ini terlihat dalam berbagai CEPA modern, termasuk negosiasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, yang mencantumkan klausul pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau dalam pasalnya (European Commission, 2024). Oleh karena itu, CEPA dapat dikategorikan sebagai kerangka kerja ekonomi yang holistik dan adaptif terhadap tantangan global kontemporer.

Dalam aspek hukum dan kelembagaan, CEPA bersifat mengikat dan dilengkapi dengan struktur organisasi yang memastikan pelaksanaannya. Biasanya, terdapat komite bersama, sub-komite teknis, serta sistem penyelesaian sengketa yang terdiri dari mekanisme konsultasi, mediasi, dan arbitrase. Fitur ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, serta menjamin keberlangsungan kerja sama antarnegara (UNCTAD, 2024). Proses evaluasi rutin juga dilibatkan guna menyesuaikan implementasi CEPA dengan dinamika ekonomi yang berkembang.

Di sisi lain, CEPA juga memiliki signifikansi strategis dalam konteks geopolitik dan diplomasi ekonomi. Negara-negara seperti Indonesia menggunakan CEPA tidak hanya untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investasi asing, tetapi juga untuk memperkuat posisi tawar dalam forum internasional seperti G20 dan ASEAN. Melalui perjanjian ini, Indonesia membangun citra sebagai mitra ekonomi yang stabil dan kooperatif, serta menunjukkan komitmen terhadap prinsip-

prinsip ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan (Kemlu RI, 2023; Sasongko, 2022).

Mekanisme kerja CEPA mencerminkan suatu kerangka kerja komprehensif yang tidak hanya berfokus pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga mencakup aspek jasa, investasi, kolaborasi ekonomi, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Proses CEPA secara umum diawali dengan tahap negosiasi dan penandatanganan perjanjian, di mana negara-negara yang terlibat merundingkan cakupan kerja sama yang akan dijalankan. Negosiasi ini menyangkut penghapusan tarif, harmonisasi regulasi, perlindungan terhadap investasi asing, dan berbagai ketentuan lainnya yang mencerminkan kepentingan ekonomi masing-masing pihak (Matondang, 2021; WTO, 2023). Setelah seluruh poin disepakati, perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebagai dasar hukum kerja sama ekonomi yang akan diimplementasikan.

Selanjutnya, CEPA diarahkan untuk menghapus atau mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, seperti bea masuk, kuota impor, serta hambatan teknis dalam perdagangan (technical barriers to trade). Ini penting untuk menciptakan arus perdagangan yang lebih efisien dan kompetitif. Hambatan non-tarif sering kali menjadi penghalang utama dalam perdagangan modern, sehingga penghapusannya menjadi bagian krusial dalam efektivitas CEPA (UNCTAD, 2022). Harmonisasi standar dan prosedur kepabeanan juga diupayakan untuk meminimalkan biaya transaksi dan memfasilitasi integrasi pasar.

Selain perdagangan barang, peningkatan akses pasar dalam sektor jasa dan investasi menjadi elemen utama dalam perjanjian CEPA. Kerja sama ini memungkinkan pelonggaran regulasi bagi perusahaan asing untuk masuk ke pasar jasa di negara mitra, termasuk sektor keuangan, pendidikan, teknologi informasi, hingga pariwisata. Dalam konteks investasi, CEPA memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian regulasi bagi investor, termasuk klausul-klausul non-discriminatory treatment, investor-state dispute settlement (ISDS), dan fair and equitable treatment (FET), yang sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi (OECD, 2023; ADB, 2021).

CEPA juga mengatur kerja sama ekonomi lintas sektor, yang mencakup pengembangan kapasitas, alih teknologi, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan keahlian tenaga kerja. Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat struktur ekonomi negara-negara mitra. Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, memanfaatkan CEPA sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan teknis, memperluas rantai pasok global, dan meningkatkan nilai tambah industri nasional (Kementerian Perdagangan RI, 2023; WTO, 2023).

Agar kerja sama ini dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan, mekanisme penyelesaian sengketa disiapkan sebagai bagian integral dari CEPA. Mekanisme ini biasanya dimulai dengan konsultasi bilateral dan dapat dilanjutkan ke tahapan mediasi atau arbitrase jika tidak ditemukan penyelesaian. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum

dan menghindari eskalasi konflik antar pihak yang terlibat (Matondang, 2021; UNCTAD, 2022).

Terakhir, untuk menjamin implementasi berjalan sesuai kesepakatan, pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan secara sistematis. CEPA biasanya mencantumkan klausul review periodik terhadap implementasi kerja sama, termasuk monitoring efektivitas penghapusan tarif, perkembangan investasi, dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi. Evaluasi ini penting untuk menilai manfaat dan dampak perjanjian secara menyeluruh, serta memberikan ruang bagi penyesuaian atau renegosiasi jika diperlukan (ADB, 2021).

CEPA sebagai kerangka perjanjian ekonomi bersifat lebih luas dibanding perjanjian perdagangan bebas (FTA) karena mencakup lebih banyak sektor dan komponen kerja sama ekonomi. CEPA mengatur aspek-aspek seperti perlindungan kekayaan intelektual, regulasi lingkungan dan ketenagakerjaan, digital trade, serta dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. (OECD, 2024). Tujuan utama CEPA adalah untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan mengurangi hambatan perdagangan, memperluas akses pasar, dan mengembangkan kerja sama lintas sektor. Perjanjian ini dirancang untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing negara peserta (Siwiyanti dkk, 2024). Selain itu, CEPA sering kali mencakup elemen-elemen seperti dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan,

dan peningkatan daya saing ekonomi domestik (Fattah, 2023). Salah satu kerjasama bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA), IA CEPA mulai berlaku pada 5 Juli 2020, ruang lingkup IA CEPA yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal dan kerja sama ekonomi.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang berperan sebagai acuan dan bahan perbandingan. Adapun pembahasan dan hasil yang diperoleh tidak terlepas dari beragam upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan diplomasi ekonominya dalam kerangka kerjasama CEPA di kawasan Indo-Pasifik. Adapun literatur pertama, penelitian yang dilakukan oleh Santoso pada tahun 2022 dengan judul “*Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*” berfokus untuk menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan melalui IK-CEPA yang berupaya untuk memberikan keuntungan yang sama sebagai bagian dari penyeimbangan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam artikel ini menemukan bahwa Indonesia mendorong perluasan kerja sama IK-CEPA ke dalam beberapa bagian, seperti energi, kesehatan dan pelayanan, serta sumber daya mineral. Kedua negara berupaya untuk dapat meningkatkan nilai perdagangan dan investasi dengan

kerangka IK-CEPA yang juga mengutamakan investasi dua arah. Maka dari itu, investasi asing langsung dari Korea Selatan untuk Indonesia diharapkan meningkat sehingga dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menanamkan modalnya di Korea Selatan. Secara bertahap, kedua negara telah mencapai kesepakatan IK-CEPA pada 2019 lalu, namun kerjasama tersebut belum berlaku yang disebabkan oleh lambatnya proses ratifikasi pada perjanjian kerja sama Indonesia dan Korea Selatan.

Sumber kedua ialah penelitian yang berjudul “*Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Era Pemerintahan Joko Widodo*” yang ditulis oleh Alvira Rizki Wulandari dan Dadan Suryadipura pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus menjelaskan peranan kelompok bisnis dalam membantu pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi IA-CEPA yang akan dilihat dalam perspektif diplomasi komersial menurut kerangka konversi Reuvers dan Ruel.

Artikel ini menekankan bahwa diplomasi komersial merupakan pemanfaatan diplomasi sebagai respon adanya peningkatan aktivitas pada sektor komersial yang mencakup aktivitas ekspor serta promosi investasi asing langsung. Tujuan dari diplomasi ini untuk mendorong tercapainya stabilitas dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan bagi negara asal. Maka dari itu, dibentuk *Indonesia-Australia Business Partnership Group* (IA-BPG) untuk memfasilitasi aspirasi kelompok bisnis setiap sektor

komoditas melakukan pertemuan secara rutin. Hasil laporan IA-BPG kemudian akan diserahkan kepada negosiator dari IA-CEPA itu sendiri.

Sumber Ketiga yaitu penelitian berjudul “*Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Kerja Sama Selatan-Selatan*” yang ditulis oleh Leonard Felix Hutabarat dan Angel Damayanti pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan Bagaimana diplomasi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai *new emerging donor* guna mencapai kepentingan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menekankan pada diplomasi ekonomi dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) sebagai instrumen fundamental serta strategi utama bagi Indonesia dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*), yang kemudian berkembang menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Seiring dengan perubahan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah, perannya dalam KSS juga mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya selaku negara penerima menjadi salah satu negara “*new emerging donors*”. Dalam kapasitas tersebut, Indonesia terus berperan aktif dengan memberikan bantuan teknis serta hibah. Artikel ini berfokus pada peran KSS Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi program yang efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan global serta menegaskan peran Indonesia sebagai *new emerging donors*, sehingga dapat memperluas pengaruh dan citra positif Indonesia di tingkat internasional.

Sumber Keempat yaitu penelitian berjudul “*Diplomasi Komersial Indonesia Ke Belanda Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)*” yang ditulis oleh Irawan J. H dan Giandi Kartasasmita. Bagaimana diplomasi komersial indonesia ke belanda masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Penelitian ini berfokus pada diplomasi komersial Indonesia-belanda masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2014). Diplomasi komersial antara Indonesia dan Belanda dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat serta memperluas kerja sama dalam sektor perdagangan dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Artikel ini menjelaskan bahwa dalam aspek investasi, perusahaan-perusahaan asal Belanda cenderung lebih dominan dalam menanamkan modalnya di Indonesia, sementara aktivitas perdagangan antara kedua negara berlangsung secara bilateral melalui pertukaran barang dan jasa. Meskipun hubungan ekonomi ini telah berkembang secara positif, masih terdapat peluang signifikan untuk peningkatan, khususnya dalam bidang perdagangan. Hingga saat ini, Belanda belum termasuk dalam lima besar negara tujuan ekspor Indonesia, meskipun peluang ekspansi pasar ke negara tersebut masih sangat terbuka. Oleh karena itu, diperlukan formulasi strategi yang lebih komprehensif dan efektif guna mengoptimalkan potensi perdagangan dan investasi, sehingga hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda dapat berkembang secara lebih substansial serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi kedua negara.

Sumber Kelima yaitu penelitian yang berjudul “*Diplomasi Indonesia Pada Indo-Pacific Economic Framework*” yang ditulis oleh Leonard Felix Hutabarat. Artikel ini menjelaskan Bagaimana Indonesia menanggapi inisiatif Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pembentukan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) pada tanggal 23 Mei 2022. Negara-negara yang tergabung dalam IPEF berlokasi di kawasan Indo-Pasifik, yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia di masa mendatang. Penelitian ini berfokus pada diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia pada IPEF bersifat politis dan strategis, dengan tujuan utama untuk menciptakan *balance of interest* dalam kerja sama ekonomi antara dua kekuatan global utama, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS).

Indonesia berperan aktif dalam proses perumusan kerangka kebijakan (*policy framework*) serta penetapan norma kerja sama (*norms setting*) yang bertujuan untuk memperkuat posisi negara-negara berkembang di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Indonesia turut berkontribusi dalam pengembangan mekanisme kerja sama (*cooperative mechanism*) yang lebih inklusif, guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dalam IPEF tidak hanya mencerminkan kepentingan negara-negara maju, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi negara-negara berkembang. Lebih lanjut, keterlibatan Indonesia dalam forum ini juga diarahkan untuk memperjuangkan prinsip sentralitas ASEAN, sehingga organisasi regional ini tetap memiliki peran yang signifikan dalam dinamika

ekonomi kawasan. Dengan demikian, diplomasi Indonesia dalam IPEF tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat posisi negara dalam arsitektur ekonomi dan politik global khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena secara komparatif menganalisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam tiga perjanjian CEPA yaitu Korea Selatan, Australia, dan Jepang dengan penekanan khusus pada aspek transfer pengetahuan, pengembangan teknologi, dan penguatan sumber daya manusia. Berbeda dari studi sebelumnya, penelitian ini secara sistematis mengevaluasi bagaimana pendekatan diplomasi yang diterapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas nasional melalui kolaborasi di sektor-sektor strategis.

Judul Dan Penulis	Teori Atau Konsep	Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Ik-Cepa); Santoso	Teori diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh Okano-Heijma	Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan melalui IK-CEPA yang berupaya untuk memberikan keuntungan yang sama sebagai bagian dari penyeimbangan kepentingan nasional Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam IK-CEPA. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada cakupan variabel dependen yang lebih luas yaitu kerja sama ekonomi komprehensif di kawasan Indo-Pasifik serta menganalisis dampak dari implementasi diplomasi ekonomi tersebut
Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic	Konversi Diplomasi Komersial Reuvers dan Ruel	Bagaimana peranan kelompok bisnis dalam membantu pemerintah Indonesia menyukseskan negosiasi IA-CEPA yang akan dilihat	Penelitian ini berfokus pada diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam IA-CEPA dan bahasan variabel independen yang lebih khusus yaitu diplomasi komersial. Sedangkan

Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019); Alvira Rizki Wulandari, Dadan Suryadipura		dalam perspektif diplomasi komersial menurut kerangka konversi Reuvers dan Ruel.	penelitian penulis berfokus pada cakupan variabel dependen yang lebih luas yaitu diplomasi ekonomi dalam kerja sama ekonomi komprehensif di kawasan Indo-Pasifik
Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Kerja Sama Selatan-Selatan; Leonard Felix Hutabarat, Angel Damayanti	Teori diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh Okano-Heijma	Bagaimana diplomasi Indonesia dalam kerja sama Selatan Selatan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai <i>new emerging donor</i> guna mencapai kepentingan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.	Penelitian ini berfokus pada diplomasi ekonomi dalam kerja sama selatan-selatan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada cakupan variabel dependen yang lebih luas yaitu kerja sama ekonomi komprehensif di kawasan IndoPasifik
Diplomasi Komersial Indonesia Ke Belanda Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014); Irawan J. H dan Giandi Kartasasmita	Teori Diplomasi Komersial : Alex Mintz and Karl DeRouen	Bagaimana diplomasi komersial indonesia ke belanda masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014);	Penelitian ini berfokus pada diplomasi komersial Indonesia-belanda masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2014). Sedangkan penelitian penulis berfokus pada cakupan variabel dependen yang lebih luas yaitu kerja sama ekonomi komprehensif di kawasan Indo-Pasifik dan tanpa kurun waktu tertentu
Diplomasi Indonesia Pada Indo-Pacific Economic Framework; Leonard Felix Hutabarat	Konstruktivisme; Teori Wendt	Bagaimana Indonesia menanggapi inisiatif Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pembentukan Indo-Pacific Economic Framework pada tanggal 23 Mei 2022	Penelitian ini berfokus pada Indo-Pacific economic Framework oleh inisiatif Joe Biden, sedangkan penelitian ini berfokus pada variabel dependen yang berbeda kerja sama ekonomi komprehensif di kawasan Indo-Pasifik

Tabel 2.4 *Penelitian Terdahulu*